

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**SITI HAWA  
NPM : 177110335**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Hawa  
NPM : 177110335  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Perikanan  
Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota  
Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan penulisan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Turut Menyetujui:  
Program Studi Administrasi Publik



Lilis Sarjani, S. Sos., M.Si

Pembimbing



Eko Handrian, S. Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Hawa  
NPM : 177110335  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua  
  
Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Sekretaris  
  
Kartius, S.Sos., M.AP  
Anggota  
  
Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
  
Indra Safri, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGSAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Hawa  
NPM : 177110335  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Perikanan  
Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota  
Pekanbaru

Pengesahan skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

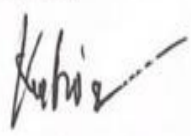
Pekanbaru, 20 Agustus 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua

  
Eko Handrian, S.Sos., M.Si


Turut Menyetujui,

  
Kartius, S.Sos., M.AP

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

  
Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

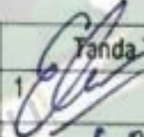
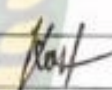
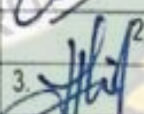

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1191/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 11 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 12 Agustus 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Hawa  
NPM : 177110335  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan kota Pekanbaru

Nilai Ujian : Angka : 82,1 ; Huruf : A<sup>-</sup>  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Kartius, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Herman, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 12 Agustus 2021  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1191/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hawa  
N P M : 177110335  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan kota Pekanbaru

**Struktur Tim :**

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Kartius, S.Sos., M.Si      | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Hendry Andry, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Herman, S.Sos., M.Si       | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk penguji-----

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru”**.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menambah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik dan Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberi arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan diri penulis.
6. Terkhusus dan sangat teristimewah penulis ucapkan terimakasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada Kedua Orang tua Ayahanda terkasih Syamsul Kasim dan Ibunda tercinta Isniah Siregar yang selalu mensertakan Doa disetiap langkah kaki anaknya dan banting tulang bercucuran keringat demi pendidikan anaknya tercinta, serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru beserta Rekan-rekan yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.



8. Kepada seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fisipol Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian proposal ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menimba ilmu untuk merajut masa depan Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin..

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pembaca pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Penulis

Ttd

Siti Hawa

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	V
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XVI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVII
SURAT PERNYATAAN.....	XVIII
ABSTRAK.....	XIX
ABSTRACT.....	XX
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	15
C. TUJUAN.....	16
D. MANFAAT PENELITIAN.....	16
BAB II	
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Administrasi.....	17
2. Konsep <i>New Public Service</i> .....	20
3. Konsep Organisasi.....	21

4. Konsep Manajemen.....	22
5. Manajemen Sumber Daya Manusia .....	24
6. Konsep Kebijakan Publik.....	25
7. Konsep Nelayan .....	26
8. Konsep perikanan tangkap .....	27
9. Konsep Pengembangan .....	28
10. Konsep Implementasi Kebijakan .....	28
B. Kerangka Pikir .....	31
C. Konsep Operasional .....	32
D. Operasional Variabel.....	37
E. Teknik Pengukuran .....	39
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Tipe Penelitian .....	45
B. Lokasi penelitian .....	45
C. Populasi dan Sampel .....	46
D. Teknik penarikan Sampel.....	47
E. Jenis dan Sumer Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Kegiatan .....	50
I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian .....	50
<b>BAB IV</b>	
<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	53
B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	53



- C. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru..... 54
- D. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru..... 63

**BAB V**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	64
A. Identitas Responden .....	64
B. Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	68
C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. ....	96
D. Faktor penghambat Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	101

**BAB VI**

PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
DAFTAR KUESIONER PENELITIAN .....	109
DAFTAR KUESIONER PENELITIAN .....	110
DAFTAR KUESIONER PENELITIAN .....	116
KUESIONER PENELITIAN .....	117

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	: Luas Perairan Umum di Kota Pekanbaru .....	4
Tabel I. 2	: Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Kategori Besarnya Usaha Per Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019 .....	5
Tabel I. 3	: Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap Tahun 2019 .....	7
Tabel I. 4	: Panitia Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan pada Kegiatan Pendamping pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019 .....	9
Tabel I. 5	: Daftar Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan di Hotel Resty Menara Pekanbaru Tahun 2019.....	9
Tabel I. 6	: Standar Operasional Prosedur Fasilitas Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.....	11
Tabel I. 7	: Tim Perencanaan, Pengendalian, dan pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan (DAK) Pada Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019. ....	14
Tabel II. 1	: Oprasional variabel Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	37
Tabel III. 1	: Populasi dan Sampel Penelitian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	46
Tabel III. 2	: Populasi dan sampel nelayan Kota Pekanbaru .....	46
Tabel III. 3	: Jadwal waktu kegiatan penelitian Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	50
Tabel V. 1	: Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Implemtasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Usia .....	64
Tabel V. 2	: Identitas Responden Masyarakat Nelayan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Usia .....	65
Tabel V. 3	: Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Implemtasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66

Tabel V. 4 : Identitas Responden Masyarakat Nelayan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
Tabel V.5 : Identitas Responden Pegawai Terhadap Implentasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	67
Tabel V.6 : Identitas Responden Masyarakat Nelayan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Program Pengembangan Perikanan Tangkap Mengenai Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap.....	70
Tabel V. 8 : Distribusi Tanggapan Responden Responden Masyarakat Nelayan mengenai Program Pengembangan Perikanan Tangkap Mengenai Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	72
Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap.....	76
Tabel V. 10 :Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	79
Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	82
Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	85



Tabel V.13 :	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	87
Tabel V. 14 :	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	90
Tabel V. 15 :	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	92
Tabel V. 16 :	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap .....	95
Tabel V.17 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	97
Tabel V. 18 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	99

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar II. 1 Kerangka pikir penelitian tentang implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada dinas pertanian dan perikanan kota pekanbaru ..... 31
- Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru..... 63



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	109
LAMPIRAN 2	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Seksi Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	115
LAMPIRAN 3	Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	116
LAMPIRAN 4	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat Nelayan Kota Pekanbaru .....	122
LAMPIRAN 5	Daftar Telly Indikator Standar Dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap untuk dinas .....	123
LAMPIRAN 6	Daftar Telly Indikator Standar Dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap untuk masyarakat nelayan .....	128
LAMPIRAN 7	Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	133
LAMPIRAN 8	Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .....	137
LAMPIRAN 9	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	138
LAMPIRAN 10	Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	139
LAMPIRAN 11	Surat Keterangan Bukti Penelitian Dari Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	140



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Hawa  
NPM : 177110335  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 13 Juli 2021

Penulis



Siti Hawa

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Oleh  
Siti Hawa

Kata kunci: Implementasi, Program, Pengembangan Perikanan Tangkap

Penelitian ini untuk mengetahui dan Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru, indikator penilaian yang digunakan meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, Politik dan Ekonomi. Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan kuesioner ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan tujuan lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 15orang, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer yang dikumpulkan dengan teknik daftar kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan observasi.Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik sampling dan insidental sampling. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan semestinya dan dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik. Namun kegiatan dan program yang dilaksanakan belum sesuai dengan filosofi program pengembangan perikanan tangkap di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF CAPTURE FISHERIES DEVELOPMENT PROGRAM AT THE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT OF PEKANBARU CITY

By

**Siti Hawa**

**Keywords:** Implementation, Program, Capture Fisheries Development

This study aims to determine and implement the Capture Fisheries Development Program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service, the assessment indicators used include Policy Standards and Targets, Resources, Inter-Organizational Relations, Characteristics of Implementing Agencies, Social, Political and Economic Conditions. This type of research uses quantitative descriptive, which prioritizes a list of questionnaires as a data collection tool and the data collected with this questionnaire is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions and the objectivity of the existence of the research location. The population and sample in this study amounted to 15 people, the types and techniques of data collection used consisted of, primary data collected by questionnaires and interviews, and secondary data collected using observation. Meanwhile, the data analysis technique used is by using sampling technique and incidental sampling. Based on this analytical technique, the researcher assessed and concluded that in this study from the side of the service apparatus, the implementation of the Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service was "implemented". This is because it is seen from an internal point of view, namely the official apparatus that the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service as the executor of the Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service has been carried out properly and seen from the perspective of the community as an external party that, to realize the Development program Capture Fisheries at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service is very important to carry out socialization to the community, this is also to help the community become more aware that the government has provided a Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service and the public is also not lacking in public information . However, the activities and programs implemented have not been in accordance with the philosophy of the capture fisheries development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, sedikitnya dapat dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan penyediaan lapangan kerja. Perikanan menciptakan lapangan kerja ketika sumber penghasilan lainnya gagal. Pentingnya perikanan tangkap tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di beberapa Negara di Asia, Eropa dan Amerika. Fakta ini diungkapkan Fauzi (2010) bahwa sektor perikanan di beberapa Negara di Eropa dan Amerika telah menjadi sumber “energi” dan mesin pertumbuhan ekonomi regional.

Peran sektor perikanan di beberapa Negara diketahui dengan tajamnya peningkatan produksi perikanan dunia. Fauzi & Anna (2002) menyebutkan bahwa sumber daya perikanan sebagai salah satu aset penting Negara apabila dikelola secara baik, dan memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat. Sementara itu kontribusi produksi perikanan tangkap laut di dunia terus menurun.

Pembangunan perikanan tangkap tidak hanya menghadapi permasalahan *overfishing* dan *overcapacity*, namun beberapa kajian amatan mengatakan bahwa keberlanjutan perikanan tangkap juga menghadapi berbagai tekanan, baik disebabkan perubahan iklim, populasi, degradasi sumber daya maupun fluktuasi harga komoditas serta sengketa batas-batas nasional yang meningkatkan kerentanan bagi nelayan dan berkelanjutan perikanan tangkap. Sementara dalam

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2019, nelayan kecil diartikan sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/ 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/ PERMEN-KEP/ 2014 Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Perikanan tangkap berbeda dengan perikanan budidaya, dimana Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan yang hidup di air laut atau perairan umum secara bebas. Sedangkan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Secara umum ada beberapa hal yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan, diantaranya di pengaruhi oleh musim, daerah penangkapan, alat tangkap dan armada tangkap yang digunakan.

Kegiatan perikanan tangkap adalah kegiatan dominan yang dilakukan oleh masyarakat/ nelayan di Kota Pekanbaru sehingga produksi perikanan di Kota

Pekanbaru hampir 98% berasal dari usaha penangkapan ikan. Pendapatan nelayan tidak terlepas dari investasi usaha, modal usaha, dan penerimaan setelah proses penangkapan. Adanya modal usaha dalam proses penangkapan dapat memberikan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan, serta sebagai sarana nelayan untuk mencari ikan di laut. Kegiatan proses penangkapan ikan dapat menentukan keberhasilan hasil tangkapan nelayan.

Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan pada umumnya memiliki tergantungan ekonomi yang sangat besar terhadap sumber daya pesisir laut. Peningkatan hasil tangkap dan budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan laut, kemampuan sumber daya nelayan, ketersediaan sarana, peralatan dan modal.

Pembangunan sektor perikanan di Kota Pekanbaru diarahkan pada pembangunan yang ramah lingkungan, produktif dan efisien, secara khusus pembangunan perikanan tangkap dilakukan dalam koridor kelstarian agar fungsi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, diantaranya melalui rasionalisasi alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan melalui optimalisasi sarana/armada penangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan. Berdasarkan pengembangan kawasan, maka pengembangan perikanan tangkap di Kota Pekanbaru terdapat pada kawasan Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir.



Potensi perikanan tangkap di Kota Pekanbaru harus dijaga kelestariannya melalui substitusi dan atau rasionalisasi alat tangkap ikana yang tidak ramaha lingkungan dan optimalisasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan yang digunakan oleh para nelayan sehingga tercipta penangkapan ikan secara lestari. Salah satu faktor rendahnya produksi hasil perikanan disebabkan oleh sebagian besar nelayan belum mempunyai perahu dan mesin yang layak sebagai armadapenangkapan ikan serta alat penangkapan ikan yang tidak memadai sehingga penangkapan belum terlaksana dengan optimal. Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Data Base (Peta) Potensi petanian Kota Pekanbaru Tahun 2007, maka total luas perairan umum di Kota Pekanbaru (eksisting) adalah 7.954,58 Ha.

**Tabel I. 1: Luas Perairan Umum di Kota Pekanbaru**

NO	JENIS PERAIRAN UMUM	KECAMATAN	LUAS (HA)
1.	Sungai Siak	Kec. Rumbai	708,75
2.	Sungai Sail	Kec. Lima Puluh	26,10
3.	Sungai Air Hitam	Kec. Air Hitam	8,10
4.	Sungai Ukai	Kec. Rumbai Timur	2,19
5.	Sungai Senapelan	Kec. Senapelan	11,25
6.	Sungai Tenayan	Kec. Tenayan Raya	9,90
7.	Sungai Pengambang	Kec. Rumbai Timur	6,30
8.	Sungai Umban Sari	Kec. Rumbai Pesisir	11,10
9.	Danau Buatan	Kec. Rumbai Pesisir	112,00
10.	Rawa		7.058,89
<b>TOTAL</b>			<b>7.954,58</b>

*Sumber :Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru*

Nelayan sebagai salah satu komponen dalam pengembangan perikanan tangkap di Kota Pekanbaru perlu dibina secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada,

maka upaya strategis yang harus ditempuh yaitu mengubah pola pikir para nelayan dari penangkapan di perairan umum daratan (PUD) ke arah budidaya ikan, baik di kolam atau bak terpal maupun di keramba/jaringan apung di perairan umum daratan (PUD).

**Tabel I. 2: Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Kategori Besarnya Usaha Per Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019**

No	Kecamatan	BESARNYA USAHA (RTP)						Jumlah (RTP)
		Tanpa Perahu	Perahu Kecil	Perahu Sedang	Perahu Besar	Motor Tempel	Kapal Motor	
1	Payung Sekaki	5	10	26	-	30	1	72
2	Senapelan	1	7	4	-	4	-	16
3	Lima Puluh	2	-	4	-	22	-	28
4	Rumbai	-	-	23	3	21	-	47
5	Rumbai Pesisir	3	31	50	2	61	18	165
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>48</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>138</b>	<b>19</b>	<b>328</b>

*Sumber: Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru*

Salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya nelayan adalah Rumbai pesisir. Rumbai pesisir memiliki jumlah nelayan terbanyak. Mata pencaharian penduduk disini cukup beraneka ragam. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dengan sungai atau perairan misalnya menjadi nelayan.

Keberadaan nelayan merupakan potensi strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun peran nelayan pada saat ini masih belum optimal karena keterbatasan yang

dimiliki nelayan, seperti akses teknologi karena keterbatasan penguasaan teknologi dan sarana penangkapan ikan, akses pasar karena panjangnya rantai pasar produsen kekonsumen, akses permodalan. Keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap minimnya pendapatan nelayan yang bermuara pada masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan tidak dapat dilakukan orang per orang. Pembinaan untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) nelayan dilakukan secara komunal melalui kelompok-kelompok nelayan. Membangun wawasan untuk maju bersama melalui kelompok, dapat mendorong partisipasi masyarakat nelayan menumbuhkan kelompok baru dan mengembangkan serta memperkuat kelompok yang sudah ada.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan tangkap di Kota Pekanbaru harus didukung oleh beberapa aspek, mulai dari sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, sarana dan prasarana serta permodalan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kemampuan usaha nelayan melalui peningkatan skala ekonomi usaha dalam wadah kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan



dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota dan disahkan oleh Instansi yang berwenang (Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Nomor 6 Tahun 2019).

**Tabel I. 3: Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap Tahun 2019**

NO	NAMA KELOMPOK NELAYAN	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)	KELAS KUB
1	Berkat Yakin	15	Pemula
2	Rantau Bertuah	14	Pemula
3	Tanjung Permai	14	Pemula
4	Teluk Sakti	11	Pemula
5	KUB Mina Patin	18	Madya
6	Mina Selais	10	Madya
7	Nelayan Sepakat	14	Pemula
8	Nelayan Bersatu	11	Pemula
9	Maju Bersama	10	Pemula
10	Palas Jaya	11	Pemula
11	Harapan Nelayan	9	Pemula
12	Harapan Jaya	16	Pemula
13	Pengambang Jaya	12	Madya
14	Berkah Mina	18	Pemula
15	Mina Gurami	10	Madya
16	Parit Belanda	11	Pemula
17	Mina Betutu	10	Pemula
18	Nelayan Terpadu	13	Pemula
19	Okura Jaya	17	Pemula
20	Ukay Jaya	13	Pemula
21	Segar Sari	12	Pemula
22	Rasau Sakti	9	Pemula
23	Rasau Sati Sehati	15	Pemula
<b>Jumlah</b>		<b>293</b>	

*Sumber :Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru*

Tujuan pembentukan KUB adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota (nelayan, wanita nelayan dan tarunan nelayan). Sedangkan bagi pihak pemerintah

(pembina), keberadaan KUB dapat meningkatkan kelancaran proses komunikasi dan pembinaan terhadap nelayan melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh penyuluh pada setiap bulan minggu pertama atau kedua di wilayah kerjanya, diharapkan nelayan yang belum tergabung ke dalam KUB supaya dapat bergabung sebagai anggota KUB yang terdekat atau membentuk KUB baru di daerah domisili nelayan bersangkutan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Seksi perikanan tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi serta penyusunan laporan di bidang perikanan tangkap. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketataleaksanaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumentasi. Pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan penyuluhan. Adapun terdapat program perikanan tangkap dimana dalam program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

## **1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

### **1.1. Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan**

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah mengadakan pelatihan kepada nelayan, Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dilaksanakan

selama 3 (tiga) hari yaitu dari Tanggal 10 s/d 12 April 2019 bertempat di Resty

Menara Hotel Kota Pekanbaru, Jl. Sisingamangaraja Nomor 89 Pekanbaru.

**Tabel I. 4: Panitia Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan pada Kegiatan Pendamping pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019**

No	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN	JUMLAH
1.	Pembina	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	1 Orang
2.	Pengarah	Kepala Bidang Perikanan	1 Orang
3.	Ketua	Kasi Perikanan Tangkap	1 Orang
4.	Sekretaris	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang
5.	Seksi Materi	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang
6.	Seksi Dokumentasi	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang
7.	Seksi Prlengkapan	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang
8.	Seksi Tamu/Peserta	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang
9.	Seksi Konsumsi	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang
10.	Seksi Transportasi	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang
11	Seksi Undangan	Tenaga Harian Lepas (THL)	1 Orang

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru*

**Tabel I. 5: Daftar Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan di Hotel Resty Menara Pekanbaru Tahun 2019**

No	NAMA KUB	JUMLAH PESERTA
1	2	3
1	KUB Rantau Bertuah	1 Orang
2	KUB Harapan Nelayan	1 Orang
3	Kub Mina Patin	1 Orang
4	Kub Berkat Yakin	1 Orang
5	KUB Nelayan Sepakat	1 Orang
6	KUB Maju Bersama	1 Orang
7	KUB Harapan Jaya	1 Orang
8	KUB Berkah Mina	1 Orang
9	Kub Nelayan Terpadu	1 Orang
10	KUB Okura Jaya	1 Orang
11	KUB Ukay Jaya	1 Orang
12	KUB Palas Jaya	1 Orang
13	KUB Segar Sari	1 Orang
14	Kub Rasau Sakti	1 Orang
15	KUB Mina Gurami	1 Orang



1	2	3
16	KUB Parit Belanda	1 Orang
17	Kub Bina Selais	1 Orang
18	KUB Mina Betutu	1 Orang
19	KUB Tangjung Permai	1 Orang
20	KUB Pengambang Jaya	1 Orang
21	Koperasi Perikanan Mina Pais	2 Orang
22	Forum KUB Juara	2 Orang
23	Forum Masyarakat Peduli Batang Siak	1 Orang

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2020*

Kegiatan pelatihan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Peserta pelatihan penguatan kelembagaan dan permodalan bersal dari perwakilan setiap KUB yang ada di Kota Pekanbaru. Pelatihan Penguatan kelembagaan dan permodalan pada kegiatan pendamping pada kelompok nelayan perikanan tangkap diikuti oleh pelaku usaha perikanan tangkap se-kota Pekanbaru sebanyak 25 orang. Nama-nama tersebut diusulkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan suatu surat keputusan sebagai peserta pelatihan.

### **1.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) merupakan kegiatan pada Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang Perikanan Tahun 2019. DAK Fisik Bidang Perikanan tersebut masuk kedalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2019 dengan nomenklatur Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat. Rinciannya kegiatannya merupakan

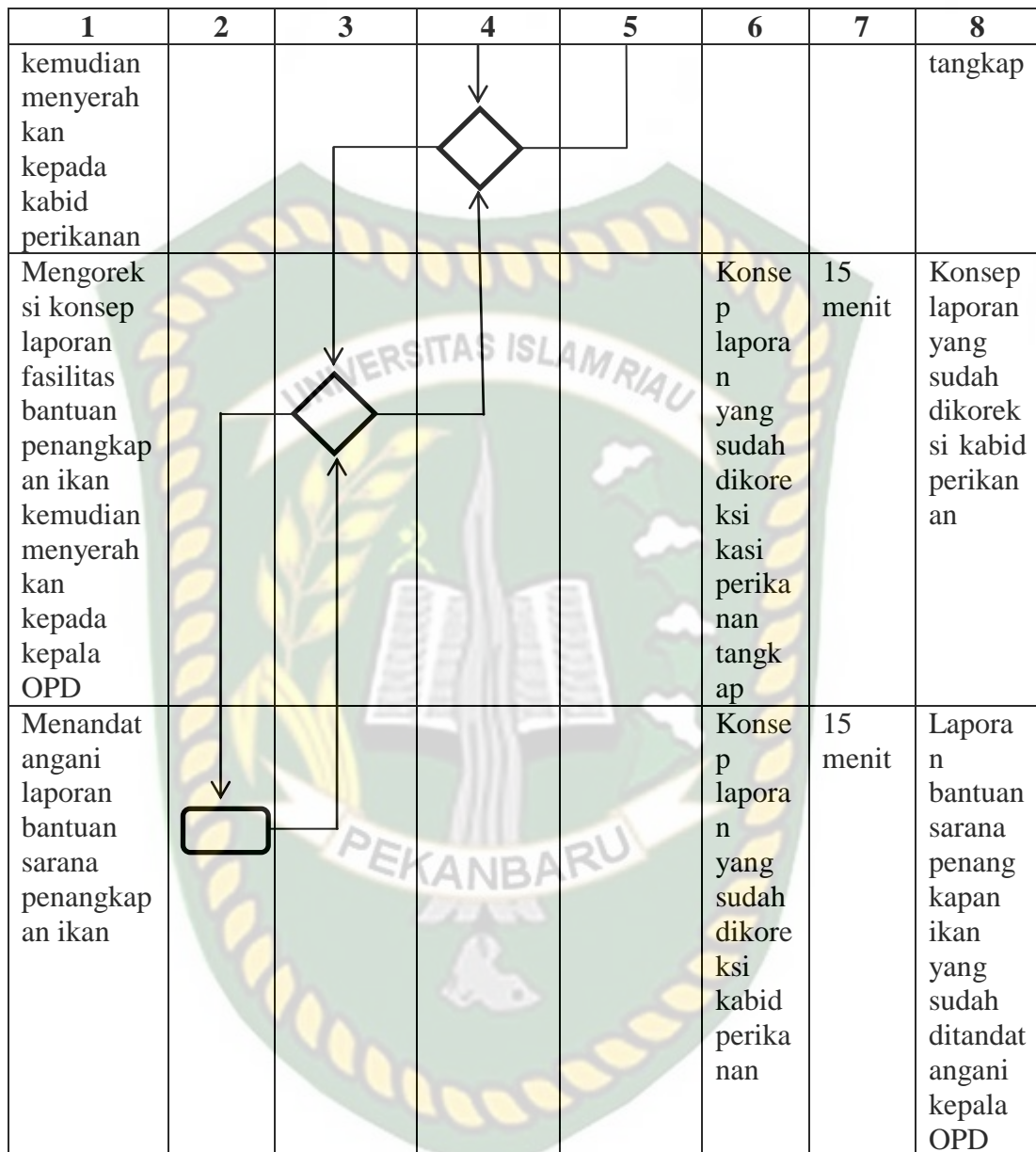
Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Sebanyak 15 Paket.

**Tabel I. 6: Standar Operasional Prosedur Fasilitas Bantuan Sarana Penangkapan Ikan**

Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		
	Kepala OPD	Kabid Perikanan	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
Menugaskan kabid perikanan untuk melakukan fasilitas bantuan sarana penangkapan ikan serta membuat laporan	□				Disposisi	15 menit	Disposisi kepala OPD
Menugaskan kasi perikanan tangkap untuk melakukan fasilitas bantuan sarana penangkapan ikan serta membuat laporan		□			Disposisi kepala OPD	15 menit	Disposisi kabid perikanan

1	2	3	4	5	6	7	8
Menugaskan atau bersama pelaksana melakukan fasilitas bantuan sarana penangkapan ikan serta menugaskan pelaksana mengetik konsep laporan			↓ □		Disposisi kabid perikanan	15 menit	Disposisi kepala seksi perikanan tangkap
Melakukan fasilitas bantuan sarana penangkapan ikan, lalu mengetik dan menyerahkan konsep laporan kepada kasi perikanan tangkap			↓	□ ↑	Disposisi kepala seksi perikanan tangkap dan konsep laporan yang akan diketik	1-3 hari	Konsep laporan yang sudah diketik
Mengoreksi konsep laporan fasilitas bantuan sarana penangkapan ikan			↓		Konsep laporan yang sudah diketik	15 menit	Konsep laporan yang sudah dikoreksi kasi perikanan





*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru*

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Nomor: 523/PA-PPK/PPKNPT/94/III/2019 maka dibentuk Tim Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Nelayan (DAK) untuk

menentukan calon penerima Paket Bantuan tersebut. Setelah Tim melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi dokumen/ data serta kelayakan kegiatan usaha penangkapan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) calon penerima paket bantuan.

**Tabel I. 7: Tim Perencanaan, Pengendalian, dan pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan (DAK) Pada Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019.**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	JUMLAH
1.	Pembina	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	1 Orang
2.	Ketua	Kepala Bidang Perikanan	1 Orang
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	1 Orang
4.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program	1 Orang
5.	Anggota	Pelaksana Bidang Perikanan	1 Orang
6.	Anggota	Pelaksana Bidang Perikanan	1 Orang
7.	Anggota	Penyuluh Perikanan Bantu	1 Orang
8.	Anggota	Penyuluh Perikanan Bantu	1 Orang
9.	Anggota	Penyuluh Perikanan Bantu	1 Orang
10.	Anggota	Penyuluh Perikanan Bantu	1 Orang

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru*

Program pengembangan perikanan tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil perikanan nelayan dengan diberikannya Sarana dan prasarana perikanan tangkap. maka pentingnya mengetahui seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan keberhasilan program.

Adapun ditemukan beberapa fenomena dan informasi yang penulis temui dilapangan yang dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini, bahwa terdapat :

1. Pada kegiatan pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dimana diikuti terdiri dari 23 kelompok dimana berdasarkan standar dan sasaran kegiatan tersebut semestinya setiap kelompok diutus 2 orang dari setiap kelompok tapi pada pelaksanaannya satu orang satu kelompok.
2. Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang perikanan tangkap. Yang mana bidang perikanan tangkap mempunyai tiga seksi namun dari penulis lihat dilapangan ada satu seksi bidang perikanan tangkap yang kosong.

Berdasarkan fenomena diatas dalam hasil pengamatan penulis secara langsung (observasi) dan sesi Tanya jawab langsung kepada staff perikanan tangkap (wawancara) .maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dengan memilih judul penelitian: **“Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari penjelasan fenomena dan permasalahan diatas dalam penelitian ini perlu mendapatkan perumusan masalah agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
2. Faktor apa saja yang menghambat Program Pengembangan Perikanan Tangkapa Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

### **C. TUJUAN**

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

- a. Manfaat bagi kepentingan akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi penelian lainnya yang berhubungan dengan penelian ini
- b. Manfaat praktis,yaitu menambah wawasan penulis dan pembaca tentang judul Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Tinjauan Pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingat cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

##### 1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012:3) bahwa administrasi berasal dari Bahasa lain *ad dan ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administration yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Istila administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis.

Dalam arti sempit, administrasi dapat dicermati dari definisi berikut :  
Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang

terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Leonard B. White administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil (dalam Syafie 2016:4).

Menurut Hadiri Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan Bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafie 2016:5).

Administrasi (Brooks adams 1913 dalam Wirman Syafri 2012;9) adalah kemampuan mengordinasikan berbagai kekuatan social sering kali bertentangan satu dengan yang lain dalam satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Administrasi didefenisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu, siagian (2003;2-3).



Zulkifli (2005;17) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus menerus menuju tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemanfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencanakita.

Batasan administrasi yang menekankan pentingnya aspek rasionalitas juga dikemukakan oleh siagian (dalam zulkifli dan moris adidi yogia, 2014;11) yaitu keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Defenisi administrasi yang secara implisit menggambarkan kesepuluh dimensi itu dirumuskan oleh The Liang Gie (dalam zulkifli dan moria adidi yogia,2014;14). Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kegiatan pokok yang dilakukan oleh segenap kelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksud unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajemen (tatapimpinan)
3. Komunikasi (tatahubungan)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatapegawaian)
6. Finansial (tatakeuangan)
7. Material (tatapembekalan)
8. Relasi public (tatahumas)

Defenisi konsep administrasi dalam arti luas bertitik tolak dari pendekatan multi aspek dan dimensi yang melekat dengan aktivitas organisasi itu. Pendekatan demikian melatar belakangi beragam redaksionis definisi organisasi yang telah ditulis. Para sarjana dan pakar pemerhati studi organisasi dalam merumuskan definisi organisasi cenderung untuk tidak lepas dari perspektif mereka terhadap peranan setiap aspek dan dimensi yang melingkupi organisasi itu. Siagian (2003;6) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut lawan.

## 2. Konsep *New Public Service*

*New public service* merupakan suatu paradig baru dalam administrasi public yang berkaitan dengan pelayanan public (Pasolong, 2016 : 141).

Menurut Miftah Thoha (2008) *The New public service* adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian tampaknya the new public service mempunyai noematif model yang bisa dibedakan dengan konsep yang lainnya. Lahirnya konsep ini tidak bisa dipisahkan dengan pendahulunya. Ide dasar konsep ini dibangun dari konsep:

- a. *Teori democratic citizen ship*
- b. Model komunitas dan *civil society*
- c. Organisasi *humanism*
- d. Post modern ilmu administrasi publik.

Konsep *New Publik Service* mempunyai model yang bisa dibedakan dengan konsep lainnya. Seperti yang dikatakan Denhard&Denhardt (2007 : 549-559) bahwa prinsip-prinsip *New Publik Service* adalah:

- a. Membantu warga masyarakat mengartikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama daripada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat kearah yang baru.
- b. Administrasi public harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut dengan kepentingan public.
- c. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan public dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- d. Kepentingan public lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama pada pada agregasi kepentingan pribadi para individu.
- e. Para pelayanan public harus memberikan perhatian, tidak semata pada pasar tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik standart professional dan kepentingan warga masyarakat.
- f. Kepentingan public lebih baik dikembangkan oleh pelayanan-pelayanan public dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat dari pada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan milik mereka

### 3. Konsep Organisasi

Konsep organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerja sama dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi (Zulkifli, 2005;74).

Organisasi adalah proses kegiatan ditata/diatur menurut sifar, bidang, jenis urgensinya, kegiatan selaku pimpinan bantuan staf, maupun pelaksana operasional. Proses kegiatan tersebut merupakan system usaha kerja sama sekelompok manusia secara rasioanal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fathoni,2006;4).

Menurut siagian, (2003;25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang lebih yang bekerja sama serta secara formal



dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Hasibuan (2001;118) pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative kepada setiap individu.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab seperti yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam zulkifli, 2005;75) sebagai berikut :

- a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
- b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny
- c. Antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan harus selalu kesesuaian
- d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilaksanakan secepatnya
- e. Kesatuan komando atau hirarki
- f. Komunikasi
- g. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap tugasnya
- h. Kontunuitas
- i. Saling asuh antara institusi lain dan staf
- j. Koordinasi
- k. Kehayatan

#### **4. Konsep Manajemen**

Definisi konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari Tindakan-tindakan planning, organizing, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti

secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula, Terry (dalam zulkifli Dan Moris Adidi Yogia,2014;18).

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara ekplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli Dan Moris Adidi Yogia, 2014;18).

Manajemen yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang. Menurut Terry manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang agar tujuan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, Terry (dalam Zulkifli Dan Nurmasari, 2015;5).

Manajemen adalah disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta atau data secara objektif kebenarannya (dalam Badrudin, 2013;2).

Kemudian prajudi (dalam Inu Kencana SYafiie, 2006;49) manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Menurut Hasibuan (2001;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2009;6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih Sulit. Ada tiga alasan utama diperlakukannya manajemen:

- a. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-saran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang harus berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

#### **5. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : men, money, method, materials, machines, dan market.

Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management. (dalam Hasibuan 2014;9).

Menurut Hasibuan (2014;10) manajemen sumber daya manusia adalah seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pengendalian, pengembangan potensi, pengintegrasian, dan pemberhentian.

## **6. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan suatu kata benda asli dari deliberas mengatasi tindakan (behavior) dari seorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi tindakan tersebut (Tilaar dan Nugroho, 2008;140).

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan diusulkan agar berguna untuk mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Friedrich dalam (Agustino 2014;7).

John Dewey dalam buku Kristian (2006;63) berpendapat bahwa kebijakan public menitik beratkan pada public dan problem-problemnya. Kebijakan public membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan public disusun dan didefenisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan kebijakan public. Makna kebijakan disini ialah kebijakn merupakan bagian dari



suatu program kebijakan yang berisikan suatu aturan ketetapan yang menjadi pedoman untuk mengimplementasikan program.

Willian Dunn menyebutkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah “pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. (Kristian, 2006;64).

Carl Friedrich mendefenisikan kebijakan public sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Anderson merumuskan kebijakan public sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi sesuatu masalah. (Pandji Santosa, 2009;35)

## **7. Konsep Nelayan**

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Undang-uundang No 31 Tahun 2004). Menurut departemen Kelautan dan Perikanan (2002), nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dilaut.

Secara geografis mesyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2002).

Menurut Imron (dalam Subri, 2005) nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budidaya.

### **8. Konsep perikanan tangkap**

perikanan adalah suatu bentuk sumber daya alam, tepatnya sumberdaya perairan (ikan) yang bernilai ekonomis dan dapat dikelola dengan suatu usaha atau kegiatan, usaha perikanan tangkap adalah suatu usaha yang menghasilkan, yaitu mengeksploritasikan seluruh benda-benda yang hidup atau berada di perairan, dalam hal ini adalah ikan. Awalnya masyarakat hanya melakukan penangkapan saja, selanjutnya baru ada handling, processing, marketing, dll. (Arifin 2012).

Wangladi (2003) mengungkapkan bahwa usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal ataupun yang dianggap sejenisnya. Definisi ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan.

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2000) usaha penangkapan ikan merupakan menangkap atau mengumpulkan binatang atau tumbuhan yang hidup di laut untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pengorbanan tertentu.

## 9. Konsep Pengembangan

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan secara bertahap.

Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas.

Istighfarotul Rahmaniyyah dalam bukunya mengatakan bahwa pengembangan terfokus pada aspek jasmani seperti ketangkasan, kesehatan, cakap kreatif, dan sebagainya. Pengembangan tersebut dilakukan dalam institusi dan juga luar institusi seperti di dalam keluarga maupun masyarakat.

## 10. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2012;158) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Abidin (2011;186) menyatakan bahwa “implementasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir.

Menurut Winarno (2007;144) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) msupun sebagai suatu dampak (outcome).

Pendapat lain dikemukakan oleh Dunn (2003;109) menjabarkan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih hubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan ke dalam bidang-bidang kesehatan, kesejahteraan social, ekonomi, dll.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan public adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau factor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor, oleh karena itu ada



beberapa factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edwards III (Subarsono 2008:90) yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi Kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target grup*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasikan kebijakan agar efektif

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implimentor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model Of the Policy Implementation (1975)*. proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang

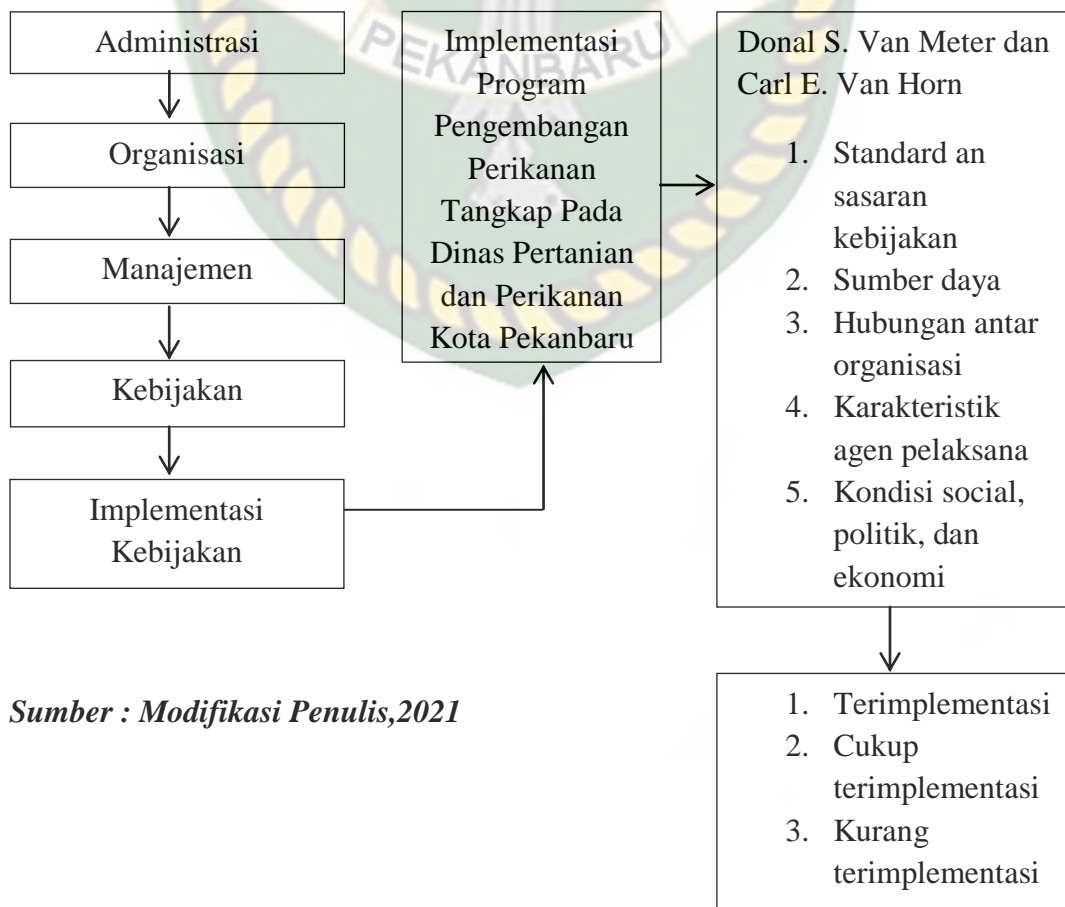
tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel (dalam Leo, 2014). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kebijakan kinerja publik. Dengan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi

## B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksud untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian.

**Gambar II. 1 Kerangka pikir penelitian tentang Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**



*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

### C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsir istilah ataupun konsep terkait skripsi ini. Maka penelitian ini memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian.

1. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2. New Public Service adalah paradigma yang mendasar atas konsep-konsep yang pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.
3. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan
4. Manajemen adalah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan sekelompok orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi
5. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dari suatu organisasi baik institusi maupun perusahaan dalam mencapai tujuan.
6. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang harus diatati untuk mencapai tujuan tertentu
7. Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah kebijakan yang diterapkan secara nyata dan sistematis untuk mencapai tujuan. Dipengaruhi

oleh beberapa variabel (Van Meter dan Van Horn di sebut dengan A Model of the policy Implementasi, 1975) sebagai berikut :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Dengan sub indikator sebagai berikut:

a.1. Meningkatkan perekonomian

Mengelola sumber daya alam dengan baik bisa dimulai dari lingkungan sendiri. Dengan mengurangi penggunaan energy dan tidak merusak sumber daya alam yang ada di sekitar kita.

a.2. Mensejahterakan kelompok nelayan

Dibentuknya KUB dapat menjadi motor penggerak tumbuhnya jiwa kewirausahaan (enterpreunership) bagi nelayan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan dari sumber daya baik daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Dengan sub indikator sebagai berikut:

b.1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang berperan sebagai pendukung kesuksesan perusahaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan dilakukan secara komunal melalui kelompok-kelompok nelayan,



### b.2. Sumber daya organisasi

Sumber daya organisasi dapat menyusun dan mengimplementasikan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

### b.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana lebih memudahkan nelayan dalam menangkap ikan di daerah penangkapan ikan.

### c. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Dengan sub indikator sebagai berikut:

#### c.1. Koordinasi

Kordinasi yang dilakukan pemerintah (Pembina) dapat meningkatkan kelancaran proses komunikasi dan pembinaan terhadap nelayan.

#### c.2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan elemen-elemen dalam pembentukan kepribadian dan karakter seorang individu, maka diadakan pembinaan kepada Kelompok Usaha Nelayan (KUB) agar dapat

memberikan dorongan dalam penumbuhan, pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjafi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Dengan sub indikator sebagai berikut:

d.1. Berpartisipasi

Partisipasi nelayan, wanita nelayan, dan taruna nelayan sangat erat kaitannya dengan kesuksesan suatu organisasi. Seperti partisipasi terhadap pelaksanaan program pengembangan perikanan tangkap dan kegiatan pendamping pada kelompok nelayan perikanan tangkap.

d.2. Transparansi

Keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah.

d.3. Responsivitas

Kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat nelayan, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta

mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

d.4. Efektif dan efisien

Dengan adanya KUB diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi usaha nelayan dengan efektif dan efisien.

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Dengan sub indikator sebagai berikut:

e.1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses bagaimana memperkenalkan system kepada seseorang (nelayan). Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan.

e.2. Politik

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan Negara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

e.3. Ekonomi

Untuk meningkatkan perekonomian nelayan maka dibentuk KUB guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha nelayan.

#### D. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indicator, item penilaian skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan dari operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan mengelompokkan item penilaian yang sama sebagai variabel penelitian adalah “ Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru” yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II. 1: Oprasional variabel Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	(Sub Indikator)	Ukuran Skala
1	2	3	4	5
Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, (dalam Leo 2014).  Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi Suatu Implementasi kebijakan	Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru	1. Standar dan sasaran kebijakan	a. Meningkatkan perekonomian  b. Mensejahterakan kelompok nelayan	Terimplementasi  Cukup Terimplementasi  Kurang Terimplementasi



1	2	3	4	5
<p>yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implemtasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kebijakan kinerja public.</p>		<p>2. Sumber Daya</p>	<p>a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Keuangan c. Sarana dan prasarana</p>	<p>Kurang Terimplementasi Terimplementasi Cukup Terimplementasi</p>
		<p>3. Hubungan antar organisasi</p>	<p>a. Koordinasi b. Sosialisasi</p>	<p>Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	2	3	4	5
Dengan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi.		4. Karakteristik agen pelaksanaan	a. Berpartisipasi b. Transparansi c. Responsivitas d. Efektif dan efisien	Terimplementasi  Cukup Terimplementasi  Kurang Terimplementasi
		5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi	a. Sosial b. Politik c. Ekonomi	Terimplementasi  Cukup Terimplementasi  Kurang Terimplementasi

*Sumber: Modifikasi penulis, 2020*

#### **E. Teknik Pengukuran**

Teknik pengukuran yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengukuran skala likert. Menurut Sugiono (2014: 132) skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Maka penelitian membedakan keadaan ke dalam 3 (tiga kategori) yaitu: Terimplementasi (3 skor) Cukup Terimplementasi (2 skor) Kurang Terimplementasi (1 skor). Adapun kategori pengukuran indikator variabel

penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk pengukuran interval menggunakan rumus  $I = 100 / \text{Jumlah Skor (Likert)}$

Maka  $= 100 / 3 = 33,3$  Hasil (I) = 33,3 (Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval:

### 1. Standar dan sasaran kebijakan

Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator standar dan sasaran kebijakantelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator standar dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator standar dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

## 2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

## 3. Hubungan antar organisasi

Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator hubungan antar organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan



jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator hubungan antar organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator hubungan antar organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam sakal 0%-33%

#### 4. Karakteristik agen pelaksana

Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

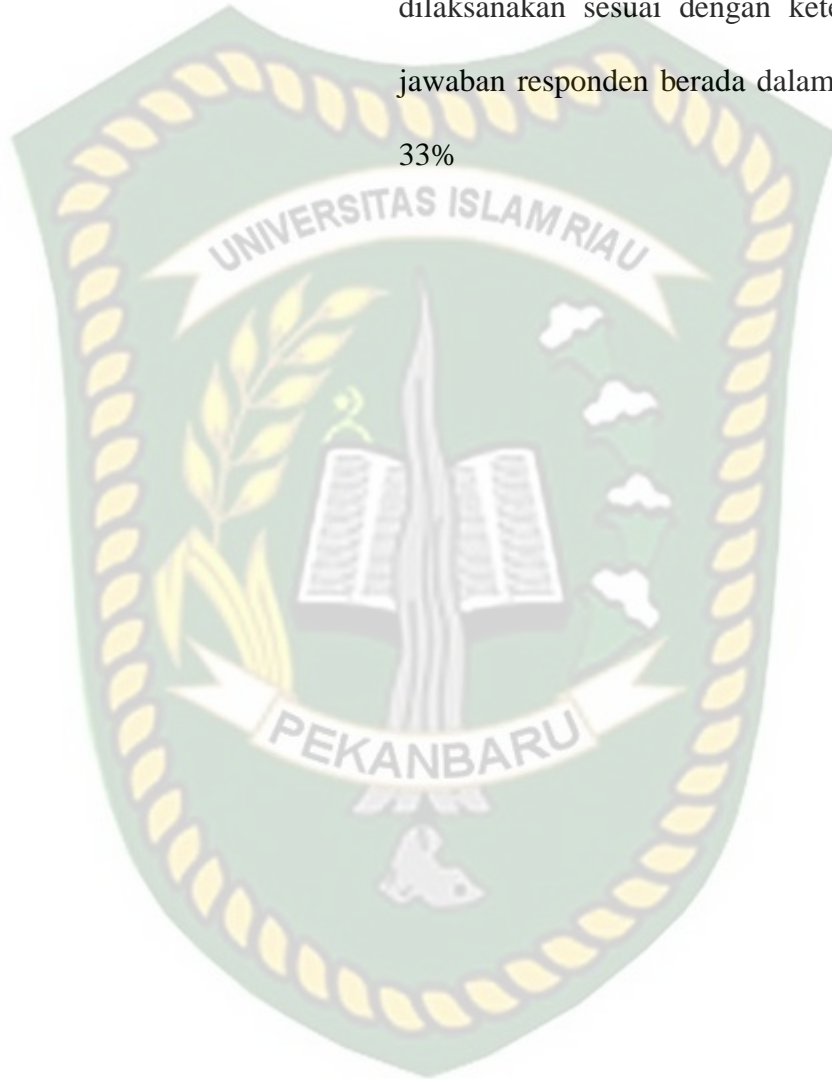
Kurang Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

#### 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator kondisi sosial, politik dan ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator kondisi sosial, politik dan ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator kondisi sosial, politik dan ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe survey deskriptif dengan analisa kuantitatif. Tipe penelitian survey deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan menggunakan sejumlah sampel (responden) dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul lebih akurat dan nyata.

Metode penelitian kuantitatif jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistic sehingga dapat dilakukan dengan cara perhitungan dan interpretasi yang disajikan dalam bentuk diagram, grafik, tabel dan pengujian hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian actual.

Oleh karena itu, penulis memilih tipe penelitian dengan tipe survey deskriptif dengan analisa kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

#### B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Alasan Penulis melakukan Penelitian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota pekanbaru karena Kota Pekanbaru memiliki 10 sungai dengan luas perairan umum daratan (sungai, rawa, dan danau) 7.954,58 Ha dengan potensi penangkapan ikan



sebesar 158 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan baru mencapai 63,76% (99,63) ton.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur yang menjadi objek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Perikanan
- b. Seksi Bidang Perikanan Tangkap
- c. Pegawai Bidang Perikanan Tangkap
- d. Nelayan

Key Informan adalah Seksi Bidang Perikanan Tangkap dan Sampel yaitu Kepala Bidang Perikanan, pegawai bidang perikanan tangkap, pegawai penyuluh perikanan dan sebagian dari masyarakat nelayan, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel

**Tabel III. 1: Populasi dan Sampel Penelitian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Perikanan	1	1	100%
2	Seksi Bidang Perikanan Tangkap	1	1	100%
3	Pegawai Bidang Perikanan Tangkap	2	1	50%
4	Pegawai Penyuluh	5	2	40%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

**Tabel III. 2:Populasi dan sampel nelayanKota Pekanbaru**

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Payung Sekaki	72	2	3%
2	Senapelan	16	2	12,5%
3	Lima Puluh	28	2	7%
4	Rumbai	47	2	4%
5	Rumbai Pesisir	165	2	1%
<b>Jumlah</b>		<b>328</b>	<b>10</b>	

*Sumber : Modifikasi Penulis,2021*

#### **D. Teknik penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Teknik penarikan sampel sampling jenuh, dalam hal ini teknik sampel sampling jenuh dilakukan bila jumlah populasinya relative kecil dan dapat dijangkau. Penarikan sampel sampling jenuh ini dilakukan pada kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
2. Selanjutnya menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling, penentuan teknik penarikan sampel purposive sampling ini digunakan untuk nelayan karena jumlah nelayan yang terlalu banyak, sehingga hanya diambil dalam jumlah sedikit saja. Adapun kriteria pengambilan sampelnya adalah masyarakat kelompok yang terdaftar di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, masyarakat kelompok yang mendapat bantuandari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat kelompok yang mengikuti pelatihan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Data yang didapatkan secara langsung dari sumber data dengan melakukan observasi, wawancara, dan memberikan angket kepada pegawai bidang perikanan tangkap dan nelayan yang berhubungan dengan Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

#### **2. Data sekunder**

Sumber data penelitian yang didapatkan melalui media perantara yang diperoleh antara lain, standar operasional prosedur, data nelayan yang ada di Kota Pekanbaru dan dokumen lainnya yang diperoleh langsung dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru,

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk melihat kondisi dilapangan tempat penelitian.

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung atau bertatap muka, teknik ini ditujukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang perikanan dan pegawai bidang perikanan tangkap.

## 3. Angket atau kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang dijawab langsung oleh pegawai bidang perikanan tangkap dan nelayan. teknik ini ditujukan kepada pegawai bidang perikanan tangkap dan nelayan.

## 4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan media perantara bertujuan untuk mengabadikan sebuah momen baik dalam bentuk foto, video, rekaman maupun dalam bentuk dokumen, teknik ini ditujukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang perikanan, dan pegawai Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kota Pekanbaru.

## G. Teknik Analisis Data

Data yang berasal dari jawaban kuesioner dan jawaban wawancara responden di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru akan diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan, dan yang akan dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu analisa yang memberikan gambaran berdasarkan kenyataan atau fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.



## H. Jadwal Kegiatan

Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

**Tabel III. 3: Jadwal waktu kegiatan penelitian Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

No	Jeniskegiatan	Bulan dan minggu tahun 2021																							
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■	■	■	■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuesioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengaduan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

## I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Adapun sistematik penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka piker, hipotesis, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengukuran

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, eknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan sistematik penulisan skripsi.

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

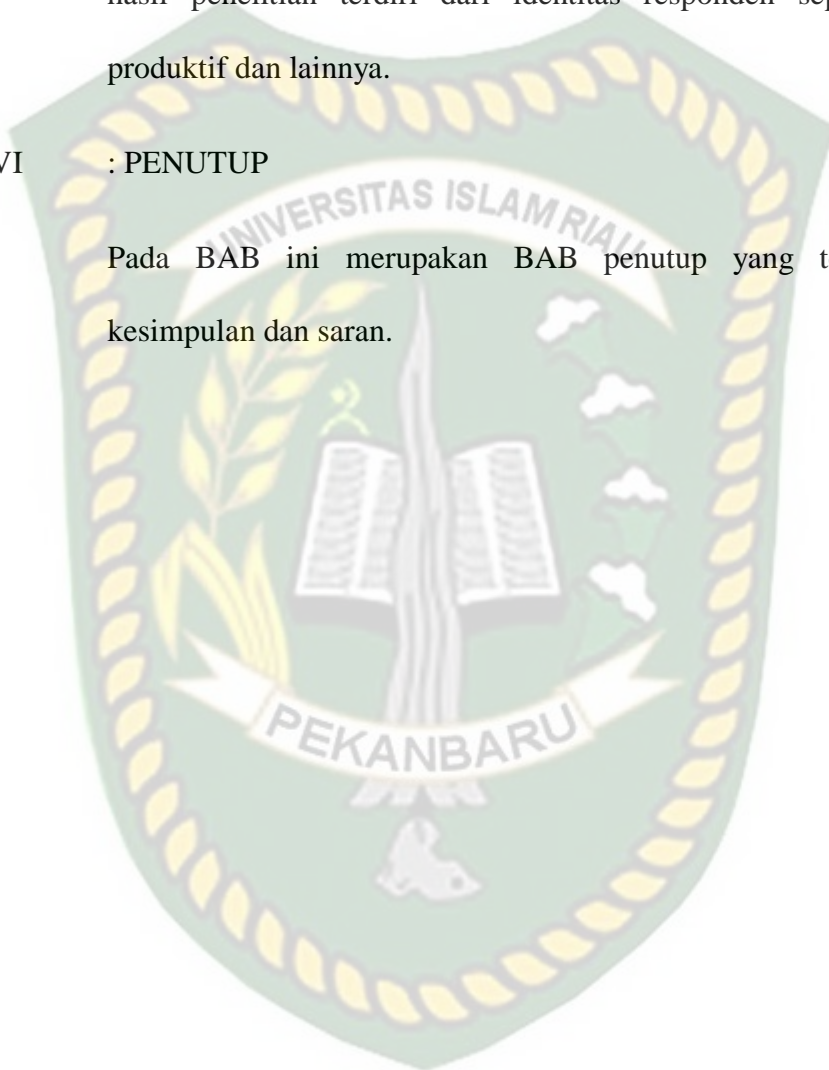
Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang sejarah ringkas

## BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, hasil penelitian terdiri dari identitas responden seperti umur produktif dan lainnya.

## BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini merupakan BAB penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota yang saat ini memiliki pembangunan yang cukup pesat di berbagai sektor dengan Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2018 tercatat 1.117.359 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,7% per tahun, merupakan potensi yang sangat besar dalam kebutuhan pangan terutama protein hewani. Sementara pada siang hari jumlah penduduk Kota Pekanbaru diperkirakan mencapai 1,4 juta jiwa karena lalu lintas penduduk ke Ibu Kota Provinsi Riau, baik dari kabupaten/ kota sekitar maupun investor dari luar Prvinsi Riau yang berdatangan masuk ke Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> (63.226 Ha) terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan, memiliki luas perairan umum daratan ( sungai, rawa, dan danau) 7.856,58 Ha dengan potensi penangkapan ikan sebesar 158 ton/ tahun dan tingkat pemanfaatan baru mencapai 63, 76% (99,63) ton.

#### B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru

Dinas Pertanian Kota Pekanbaru pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas- Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang merupakan



penggabungan dari 3 unit dinas dan 5 sektor, yaitu : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Sedangkan subsector Tanaman Pangan dan Hortikultura, Subsektor Kehutanan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 pengalihan urusan pemerintahan konkuren termasuk kehutanan dialihkan ke Provinsi. Oleh karena itu, sejak tanggal tersebut subsector kehutanan tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya Dinas Pertanian Kota Pekanbaru berubah nama menjadi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9). Pada Bab II Pasal 2 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.

### **C. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru**

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas : membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian dan bidang perikanan serta tugas pembantuan lainnya (Pasal 4 ayat 1).

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian dan perikanan.
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perikanan.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pertanian dan perikanan.
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan perikanan.
  - e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dan lingkup tugasnya.
  - f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas : merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (pasal 5 ayat 1)

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum.
- 2) Sub Bagian Keuangan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### 3. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- c. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- d. Pemantauan. pengevaluasian dan pelaporan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

- 1) Seksi Tanaman Pangan.
- 2) Seksi Hortikultura.
- 3) Seksi Perkebunan.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.



#### 4. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas : membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan peternakan ( Pasal 14 ayat 1).

Bidang peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijaksanaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang peternakan.
- pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pembinaan umum di bidang peternakan, kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis di bidang peternakan.
- pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang peternakan.
- pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengawasan teknis usaha dibidang peternakan.
- pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- perumusan dan penyusunan laporan evaluasi tahunan dan laporan evaluasi lima tahunan di bidang peternakan.
- pengkoordinasian, pembinaan, perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan di bidang peternakan.

- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- b. Seksi Pengembangan Ternak.
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pasca Panen.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

#### 5. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas : membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perikanan (Pasal 19 ayat 1).

Bidang Perikanan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan

benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.

- Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan,



peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.

- Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Pelaksanaan pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang perikanan,
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan bidang perikanan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perikanan.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan terdiri dari :

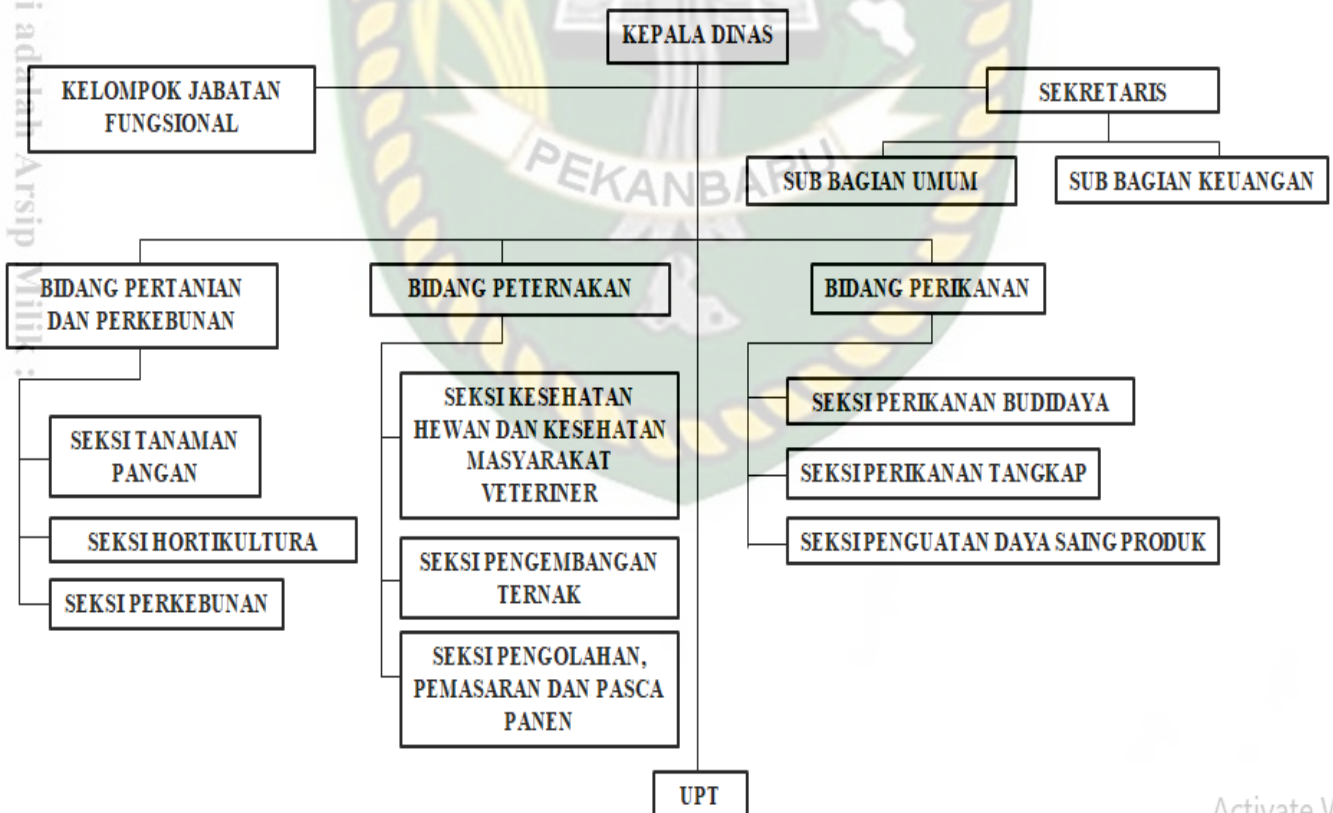
- a. Seksi Perikanan Budidaya
- b. Seksi Perikanan Tangkap
- c. Seksi Penguatan Daya Saing Produk.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

#### D. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Dalam dunia administrasi tidak pernah terlepas dari yang namanya organisasi dan manajemen. Untuk mempermudah proses administrasi dan manajemen dalam berorganisasi, maka dibentuklah sebuah struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagian berikut ini :

**Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**



Activate V

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap, penulis mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kuesioner penelitian yang diawali dengan identitas responden dalam melakukan penelitian ini. Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut:

##### 1. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam melakukan tindakan dan berfikir dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan. Biasanya yang lebih tua cenderung lebih

**Tabel V. 1 Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1.	20-30	0	0%
2.	31-40	3	60%
3.	41-50	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 di atas diketahui bahwa usia sangat mempengaruhi tingkat kerja atau produktivitas kerja. Aparatur dinas yang produktif dalam

bekerja adalah usia 20-30 tahun dan 31-40 tahun dibandingkan dengan usia 41-50 tahun. Menurut Tanto (2012) dan Mahendra dan Woyanti (2014) dalam kutipan Selvia Apriliyanti (2017 : 69) salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas karyawan adalah faktor usia. Usia yang masih dibawah produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lebih lemah dan terbatas.

**Tabel V. 2 Identitas Responden Masyarakat Nelayan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20-30	0	0%
2	31-40	4	40%
3	41-50	6	60%
	Jumlah	10	100%

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa responden masyarakat nelayan terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang berada pada usia 41-50 berjumlah 6 orang dan pada usia 31-40 berjumlah 4 orang. Hal ini dikarenakan nelayan yang lebih muda cenderung rendah pengalamannya dan lebih memilih profesi lain sebagai mata pecaharian jika dibandingkan ledengan nelayan yang lebih tua, ataupun disebabkan karena faktor lain seperti nelayan yang lebih tua lebih stabil, lebih matang, mempunyai pandangan yang seimbang terhadap kehidupan.



## 2. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin Laki-laki dan jenis kelamin Perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkatan emosional responden yang bersangkutan didalam melakukan kegiatan sekaligus didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden masyarakat nelayan Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel V. 3 Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1.	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.3 bahwa laki-laki lebih dominan, hal ini dikarenakan pengetahuan dan penguasaan dibidang perikanan tangkap lebih unggul dari pada perempuan.

**Tabel V. 4 Identitas Responden Masyarakat Nelayan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	10	100%
2	Perempuan	0	0%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.4 diatas bahwa diketahui responden terhadap Implementasi Pengembangan Perikanan Tangkap semua laki-laki yaitu berjumlah 10 orang, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa diketahui responden terhadap Implementasi Pengembangan Perikanan Tangkap di dominasi oleh laki-laki, hal ini dikarenakan didalam keluarga laki-laki yang mencari nafkah.

### 3. Tingkat Pendidikan

Selanjutnya dalam identitas responden pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.5 Identitas Responden Pegawai Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1.	SD	0	0%
2.	SLTA	0	0%
3.	Diploma	0	0%
4.	Sarjana (S1/S2)	5	100%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.5 bahwa Identitas Responden Pegawai Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Pendidikan berada pada tingkat pendidikan Sarjana (S1/S2) yaitu berjumlah 5 orang, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana dan cara kerja aparatur dinas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai dinas maka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,

akan tetapi jika tingkat pendidikannya semakin rendah maka kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga semakin terbatas.

**Tabel V.6 Identitas Responden Masyarakat Nelayan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1.	SD	6	60%
2.	SLTA	4	40%
3.	Diploma	0	0%
4.	Sarjana (S1/S2)	0	0%
	Jumlah	10	100%

*Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi sikap dan pola prilakunya. Dalam tabel di atas responden terhadap Implementasi Program Perikanan Tangkap lebih dominan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang berjumlah 6 orang dan untuk tingkat SLTA berjumlah 4 orang. Hal ini dikarenakan untuk menjadi seorang nelayan tidak membutuhkan jenjang pendidikan yang cukup tinggi.

## **B. Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

Untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Standar dan Sasaran

Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agrn Pelaksana dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan apa yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dari standar kebijakan dan sasran harus dilihat secara lebih spesifik sehingga diakhir program tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program atau kebijakan yang dilaksanakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Nelayan Berjumlah 10 orang responden terhadap indikator Standard an Sasaran Kebijakan yang terdiri dari dua item penilaian yaitu meningkat perekonomian nelayan, mensejahterakan kelompok nelayan tentang Implementasi Program Perikanan Tangkap, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :



**Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Program Pengembangan Perikanan Tangkap Mengenai Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Meningkatkan Perekonomian	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5
2.	Mensejahterakan Kelompok Nelayan	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5
	Jumlah	5	5	0	10
	Rata-rata	2,5	2,5	0	5
	Persentase	50%	50%	0%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.7 bahwa tanggapan responden aparatur dinas mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi”

Meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas merasa kegiatan yang dilakukan oleh dinas sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pemberian program perikanan laut tangkap dan kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.

Mensejahterakan kelompok nelayan. Dilihat dari jawaban responden yang menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas yang merasa bahwa program yang dijalankan pemerintah dan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat seperti salah satu kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah

nelayan dan juga pembentukan KUB yang bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Ibnu Rusydi selaku Seksi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak ukuran standar dan sasaran kebijakan program pengembangan perikanan tangkap pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru? Beliau Menjawab :

*“yang menjadi ukuran standar dan sasaran kebijakan program pengembangan perikanan tangkap pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru adalah terealisasinya secara fisik anggaran program pengembangan perikanan tangkap sebesar 98,33% dengan keuangan sebesar Rp. 449.272.825,- dengan berbagai bentuk kegiatan dan yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat nelayan di Kota Pekanbaru. (Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Diketahui dari hasil wawancara bahwa ukuran Standar dan Sasaran Kebijakan bahwa anggaran yang telah disediakan untuk program tersebut harus direalisasikan secara nyata dengan berbagai bentuk kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan di kota Pekanbaru.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan hampir disetiap kegiatan program pengembangan perikanan tangkap telah dilaksanakan hal dibuktikan dengan bentuk laporan tahunan mengenai kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas bahwa untuk indikator Standar dan Sasaran kebijakan berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan program pengembangan perikanan tangkap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti dengan pemberian program perikanan laut tangkap dan kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, kemudian pembentukan KUB yang bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan terealisasinya secara fisik anggaran program pengembangan perikanan tangkap sebesar 98,33% dengan keuangan sebesar Rp. 449.272.825,- dengan berbagai bentuk kegiatan dan yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat nelayan di Kota Pekanbaru serta kegiatan program pengembangan perikanan tangkap telah dilaksanakan hal dibuktikan dengan bentuk laporan tahunan mengenai kegiatan tersebut.

**Tabel V. 8 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan mengenai Program Pengembangan Perikanan Tangkap Mengenai Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Meningkatkan Perekonomian	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10
2.	Mensejahterakan Kelompok Nelayan	5 (50%)	5 (50%)	0 (%)	10
	Jumlah	12	8	0	20
	Rata-rata	6	4	0	10
	Persentase	60%	40%	0%	100%

*Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan berada pada kategori “Terimplementasi”.

Meningkatkan Perekonomian. Dilihat dari jawaban responden masyarakat nelayan menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat nelayan merasa dengan adanya program pengembangan perikanan tangkap dapat meningkatkan perekonomian mereka dari yang sebelumnya seperti dengan adanya bantuan belanja hibah barang atau jasa berupa perahu dan peralatan untuk bernelayan sehingga hasil tangkapan nelayan meningkat yang sebelumnya rata-rata pendapatan perharinya Rp.70.000 menjadi Rp. 100.000.

Mensejahterakan Kelompok Nelayan. Dilihat dari jawaban responden masyarakat nelayan menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program perikanan tangkap dan dibentuknya kelompok nelayan yang kemudian kelompok tersebut didaftarkan untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang setiap tahunnya terdapat dua kelompok KUB yang mendapat bantuan dari program tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok KUB bapak Irwansyah Putra. Mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak apakah sasaran kebijakan program pengembangan perikanan tangkap pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran? Beliau Menjawab :

*“saya merasakebijakan program pengembangan perikanan tangkap pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas*



*Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran hal ini dikarenakan kegiatan tersebut memang benar adanya kami setiap tahun di undang untuk mengikuti pelatihan dengan sistem perwakilan dan kami juga sudah banyak menerima berbagai bantuan seperti jaring untuk menangkap ikan dan lain-lain.*

*(Wawancara :Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Diketahui dari hasil wawancara bahwa Sasaran Kebijakan sudah tepat sudah banyak kelompok masyarakat nelayan yang telah merasakan program tersebut dengan realisasi berbagai kegiatan yang sangat membantu mereka.

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program perikanan tangkap seperti bantuan perahu, pelatihan- pelatihan yang diadakan pihak dinas terkait dan dibentuknya kelompok nelayan sehingga masyarakat nelayan dapat dikatakan sejahtera secara perekonomian, ini merupakan bentuk bahwa terimplementasinya Program Pengembangan Perikanan Tangkap telah sesuai standar dan sasaran kebijakan langsung mengarah kepada pihak nelayan yang dapat dirasakan secara langsung baik berupa fasilitas bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat nelayan dalam menjalankan program pengembangan perikanan tangkap seperti mesin kapal, kapal, alat tangkap, alat keselamatan, bantuan modal dan pembinaan secara berkala yang dilakukan.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Terimplementasi”.Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program perikanan tangkap dan dibentuknya kelompok

nelayan. Program Pengembangan Perikanan Tangkap telah sesuai standar dan sasaran kebijakan dirasa sudah tepat yang langsung mengarah kepada pihak nelayan yang dapat dirasakan secara langsung baik berupa fasilitas bantuan sarana dan prasarana, modal serta pembinaan kepada masyarakat nelayan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya menunjukkan seberapa besar dukungan dari pelaksanaan bantuan dan sumber daya manusia sekaligus sarana/prasarana untuk melaksanakan program atau kebijakan. Sumber daya juga dapat dikatakan sebagai pelaksanaan atau implementor yang diarahkan dengan memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari sarana/prasarana maupun kekuasaan yang dapat menunjang implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Nelayan yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator Sumber Daya yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu sumber daya manusia, pelaksanaan bantuan dan sarana/prasarana. Sebagai berikut:

**Tabel V.9 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Sumber Daya Manusia	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5
2.	Sumber Daya Finansial	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5
3.	Sarana/prasarana	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5
	Jumlah	10	5	0	15
	Rata-rata	3,3	1,7	0	5
	Persentase	67%	33%	0%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat dilihat untuk tanggapan aparatur dinas untuk indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”

Sumber daya manusia SDM adalah ilmu seni dan mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan 2006:1). Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur pelaksana merupakan orang orang yang berkompeten didalamnya seperti pada kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan dan permodalan dalam pelatihan tersebut aparatur sebagai panitia pelaksana merancang materi yang disampaikan, narasumber pendamping narasumber, pembawa acara, dan kegiatan didalamnya secara matang, hal ini menandakan bahwa secara SDM aparatur telah siap dan berkompeten dalam Program tersebut.

Sumber daya finansial. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan untuk kegiatan program pengembangan perikanan tangkap telah disediakan anggaran dengan jumlah anggaran pada tahun 2019 DPA-SKPD yang terdiri dari dana alokasi khusus bidang perikanan sebesar Rp. 4014.107.000 dan melalui dana APBD murni Kota Pekanbaru sebesar Rp. 55.779.000.

Sarana/Prasana. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan sarana program pengembangan perikanan tangkap dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme penganggaran APBD, dimulai dari musrenbang tingkat kecamatan hingga pengesahan APBD.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ibnu Rusydi selaku Seksi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Apakah Bapak sudah melaksanakan tugas dalam program pengembangan perikanan tangkap sesuai dengan standard operasional prosedur atau SOP yang berlaku? Beliau Menjawab :

*“Secara umum sudah, karena selama ini sejak program kebijakan ini dikeluarkan dan pelaksanaan program ini harus terealisasi baik dari segi anggaran, aturan dan penerapannya di lapangan dan yang menjadi dasar acuan kami menjalankan tugas adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 113 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru, hanya saja satu tahun belakangan ini ada kendala Covid-19 ini kita tidak bisa memberikan pelatihan-pelatihan pada kawan-kawan nelayan, secara umum sudah dilihat dari sisi efektif dan efisiennya ini sangat membantu masyarakat terutama tentang kebijakan dan kegiatan yang merupakan berhubungan dengan pemerintah”*

*(Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB).*



Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa dari segi sumber daya, terutama sumber daya manusia sudah terlaksana sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pada Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Akan tetapi terdapat kendala salah satunya karena covid-19 tidak bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelathian.

Berdasarkan observasi peneliti, indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan adalah aparatur dinas yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, jumlah anggaran yang telah ditetapkan, dan sarana prasarana sperti kegiatan pelathan,aula, kendaran untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuannya.

Dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”.Hal ini dikarenakan Sumber daya yang terkandung didalamnya sebagai pelaksana atau implementor sangatlah mendukung dalam implementasi kebijakan dalam suatu program yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan dari program yang dilaksanakan itu sendiri. Aparatur pelaksana merupakan orang orang yang berkompeten didalamnya seperti pada kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan dan permodalan dalam pelatihan tersebut aparatur sebagai panitia pelaksana merancang materi yandisampaikan, narasumberm pendamping narasumber, pembawa acara, dan kegiatan didalamnya secara matang, hal ini menandakan bahwa secara SDM aparatur

telah siap dan berkompeten dalam Program tersebut, jumlah anggaran pada tahun 2019 DPA-SKPD yang terdiri dari dana alokasi khusus bidang perikanan sebesar Rp. 4014.107.000 dan melalui dana APBD murni Kota Pekanbaru sebesar Rp. 55.779.000. Sarana program pengembangan perikanan tangkap dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme penganggaran APBD, dimulai dari musrenbang tingkat kecamatan hingga pengesahan APBD. Serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

**Tabel V. 10 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Sumber Daya Manusia	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10
2.	Sumber Daya Finansial	4 (40%)	3 (30%)	3 (30%)	10
3.	Sarana/prasarana	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10
	Jumlah	18	9	3	30
	Rata-rata	6	3	1	10
	Persentase	60%	30%	10%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.10 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”.

Sumber daya manusia. Dilihat dari jawaban responden masyarakat nelayan mereka menjawab Terimplementasi, karena masyarakat nelayan menilai bahwa pegawai perikanan tangkap sudah menjalankan tugasnya dengan baik seperti mengadakan pelatihan, sosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak nelayan. Sumber daya finansial. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat nelayan menilai dari segi efisiensi finansial jumlah bantuan yang mereka dapatkan seperti kapal perahu, jaring, senter, dan mesin.

Sarana/prasarana. Dilihat dari responden masyarakat nelayan mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat nelayan melihat sarana/prasarana sudah berjalan dengan baik seperti tempat pelatihan yang diadakan di hotel ataupun di aula.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa untuk indikator Sumber Daya berada pada kategori "Terimplementasi". Hal ini dikarenakan terkhususnya pada sumber daya manusia fakta yang terjadi dilapangan adalah aparatur dinas memang memiliki kemampuan untuk memberikan berbagai bentuk kepada nelayan, seperti pola komunikasi, pelatihan perawatan bantuan yang telah diberikan, dan pelatihan penggunaan bantuan yang diberikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok KUB bapak Irwansyah Putra. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak apakah Sumber Daya

terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah memadai? Beliau Menjawab :

*“Menurut kami sebagai kelompok nelayan sudah cukup terimplementasi, karena pada pelaksanaan program ini para pegawainya sudah cukup mahir ramah dan pola komunikasinya sanga baik kepada kami, bantuannya juga sanga bermanfaat seperti bantuan perha yang kami dapatkan tahu lalu dan setiap ada pelatihan kami selalu diundang seminar baik itu di hotel ataupun di aula”*

*(Wawancara : Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa dari segi sumber daya sudah bagus baik dari segi pegawainya, anggaran bantuan dan sarana prasana untuk menunjang berjalannya program tersebut.

Dengan demikian hasil penyebaran kueioner, observasi bahwa indikator Sumber Daya berada pada Kategori “Terimplentasi”. Hal ini dikarenakan karena masyarakat nelayan menilai bahwa pegawai perikanan tangkap sudah menjalankan tugasnya dengan baik seperti mengadakan pelatihan, sosilisasi dan berkomunikasi dengan pihak nelayan, dari segi efisiensi finansial jumlah bantuan yang mereka dapatkan seperti kapal perahu, jaring, senter, dan mesin juga sangat bermanfaat, seta saran dan prsarana yang baik seperti tempat pelatihan yang diadakan di hotel ataupun di aula.

### 3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi adalah sebuah usaha untuk menjalankan suatu program agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan hubungan antar organisasi ini bias dikatakan sebagai



salah satu keberhasilan dari suatu program dengan adanya dukungan koordinasi dan sosialisasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator Hubungan Antar Organisasi yang terdiri dari dua item penilaian yaitu koordinasi dan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel V.11 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Koordinasi	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5
2.	Sosialisasi	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5
	Jumlah	8	2	0	10
	Rata-rata	4	1	0	5
	Persentase	80%	20%	0%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat dilihat untuk tanggapan Aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplemntasi”

Koordinasi. Dilihat dari jawaban Terimplementasi, dikarenakan mereka merasa bahwa koordinasi antara atasan dan bawahan sangat baik, segala informasi yang berkaitan dengan perikanan tangkap dan yang lainnya mereka mendapatkan informasinya seperti halnya persiapan pelaksanaan pelatihan penguatan kelembagaan dan permodalan.

Sosialisasi. Dilihat dari jawaban Terimplementasi, dikarenakan sebelum dilaksanakan kegiatan pada program pengembangan perikanan tangkap akan terlebih dahulu disosialisasikan dan melihat kondisi nelayan, dilaksanakan melalui perwakilan anggota kelompok, bimbingan teknis dari dinas dan penyuluh ke kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Ibnu rusydi selaku Seksi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi dengan pertanyaan Bagaimana menurut bapak hubungan antar organisasi dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru? Apakah ada hambatan? Beliau menjawab :

*“Kalau hubungannya secara berdasarkan SOP yang jelas kalau kita di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru adalah sebagai penghubung, jadi setiap ada kebijakan ataupun program nasional kita adalah ujung tombak pelaksananya ke masyarakat nelayan. Dan secara hambatan ya jelas ada yang pertama, anggaran yang diberikan belum dapat semuanya menjangkau para masyarakat nelayan, yang kedua komitmen pimpinan masih belum semuanya terlaksanakan misalnya kadang-kadang pimpinan itu berkata kerjakan terkadang tidak langsung dilaksanakan oleh anggota.*

*(Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hubungan Antar Organisasi secara keseluruhan sudah optimal karena namun masih adanya beberapa hambatan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “ Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi antara seksi perikanan tangkap dan seksi penguatan daya saing produk

dalam menyusun usulan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, melaksanakan kegiatan, melakukan pemantauan, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan bahwa koordinasi antara atasan dan bawahan sangat baik, sebelum dilaksanakan kegiatan pada program pengembangan perikanan tangkap akan terlebih dahulu disosialisasikan dan melihat kondisi nelayan, dilaksanakan melalui perwakilan anggota kelompok, bimbingan teknis dari dinas dan penyuluh.

Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru adalah sebagai penghubung, jadi setiap ada kebijakan ataupun program nasional kita adalah ujung tombak pelaksana ke masyarakat nelayan kemudian adanya koordinasi antara seksi perikanan tangkap dan seksi penguatan daya saing produk dalam menyusun usulan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, melaksanakan kegiatan, melakukan pemantauan, monitoring evaluasi dan pelaporan.

**Tabel V.12 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Koordinasi	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10
2.	Sosialisasi	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	10
	Jumlah	18	2	0	20
	Rata-rata	9	1	0	10
	Persentase	90%	10%	0%	100

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel V. 12 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplementasi”.

Koordinasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat nekayan mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat nelayan ini merasa koordinasi dengan pihak terkait masih terus berlanjut hingga saat ini.

Sosialisasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat nelayan ini mendapatkan sosialisasi baik berupa informasi, tatacara, dan pembinaan publik terkait program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok KUB bapak Irwansyah Putra. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut bapak hubungan antar



organisasi dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru? Beliau Menjawab :

*“Koordinasinya sudah cukup baik, karena pada pelaksanaan program ini kami membentuk sebuah KUB yang mana didalam KUB tersebut setiap anggotanya memiliki tugas masing masing” (Wawancara :Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada Kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan maksimalnya koordinasi sesama OPD-OPD terkait dan juga masyarakat nelayan sehingga koordinasi dengan pihak terkait masih terus berlanjut hingga saat ini, Sosialiasi yang baik dilaksanakan membuat optimalnya informasi yang diperoleh oleh aparatur dinas dan masyarakat itu sendiri.

Dari hasil penyebaran kuesioner, obervasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplementasi”.dikarenakanmasyarakat nelayan ini mendapatkan sosialisasi baik berupa informasi, tatacara, dan pembinaan publik terkait program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah pelaksana mengimplementasikan kebijakan dan menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi tersebut, nilai-nilai yang berkembang, serta hubungan-hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Karakteristik agen pelaksana juga mencangkup pada norma-norma, struktur birokrasi, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang

mencakup karakteristik agen pelaksana akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator Karakteristik Agen Pelaksana yang terdiri dari tiga item penilai yaitu Berpartisipasi, Transparansi, Responsivitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel V.13 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilai			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Berpartisipasi	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5
2.	Transparansi	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5
3.	Responsivitas	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5
	Jumlah	15	0	0	15
	Rata-rata	100	0	0	100
	Persentase	100%	0%	0%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan table V.13 diatas jawaban responden aparatur dinas mengenai indikator Karakteristik agen pelaksana berada pada kategori “Terimplementasi”.

Transparansi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah terbuka dalam memberikan informasi publik seperti pengumuman kelompok mana saja yang mendapatkan bantuan dan besarnya anggaran dapat diakses langsung oleh masyarakat nelayan di web resmi dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru.

Berpartisipasi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah memberikan pembinaan, pembimbingan, bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk bernelayan, seperti kunjungan tim pelaksana Reviu APIP ke KUB Mina Patin dalam rangka pengawasan, yang telah sesuai program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Responsivitas. Dilihat dari jawab responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah melaksanakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru secara cepat dan tanggap sesuai dengan ketentuan yang ada seperti kegiatan perlindungan nelayan berupa penyerahan Claim kematian alami BPAN kelompok KUB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Ibnu rusydi selaku Seksi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana dengan pertanyaan Bagaimana menurut Bapak karakteristik agen pelaksana program pengembangan perikanan tangkap? Apakah sudah terlaksana dengan baik? Beliau menjawab :

*“Ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik ini menyangkut beberapa kriteria yang pertama yang jelas program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Itu adalah berhubungan dengan kebijakan dan kegiatan pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan msayrakat nelayan serta hal tersebut sudah sangat dirasakan hasilnya oleh masyarakat nelayan tersebut.*

*(Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas Karakteristik Agen Pelaksana sangat berperan penting dalam melaksanakan pelayanan publik. Dari kompetensi, transparansi, akuntabilitas, berpartisipasi, dan responsivitas adalah karakteristik yang memang harus dimiliki oleh aparatur dinas atau pelaksana pelayanan publik, dengan ini dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dan sehat terutama dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan kompetensi yang baik dalam memproses aspirasi dan pengaduan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, optimalnya informasi publik yang diberikan atau transparansi dalam membrikan informasi publik, sudah sepenuhnya mampu menangani membantu masalah yang dihadapi masyarakat nelayan selama ini.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Terimplemntasi”. Hal ini dikarenakan yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan aparatur dinas pelaksanaan tugasnya dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Maka dari itu sangat perlunya kompetensi, transparansi, akuntabilitas, berpartisipasi dan responsivitas yang harus dimiliki oleh pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.



**Tabel V. 14 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Berpartisipasi	4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)	10
2.	Transparansi	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10
3.	Responsivitas	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10
	Jumlah	14	12	4	30
	Rata-rata	4,7	4	1,3	10
	Persentase	47%	40%	13%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berpartisipasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi dan cukup terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai aparaturnya sudah berpartisipasi seperti kegiatan berupa penyerahan mesin kepada kelompok KUB dalam terlaksananya program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Transparansi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah memberikan informasi publik secara terbuka informasi dapat diakses di web resmi dinas pertanian dan peternakan.

Responsivitas. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat mendapat efek dari cepat dan tanggapannya setiap ada kemalangan dari anggota KUB yang terdaftar dalam

program pengembangan ikan tangkap maka pihak dinas langsung memberikan santunan dalam pelayanan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok KUB bapak Irwansyah Putra. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut bapak apakah dalam melaksanakan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru para pegawainya sudah berpartisipasi, transparan dan rensponsif? Beliau Menjawab :

*“kalau menurut kami sudah, hal ini para pegawai ikut turun kelapangan membantu kami para nelayan dalam menggunakan alat bantuan seperti mesin, kemudian mereka juga sangat ramah ramah dan baik-baik” (Wawancara : Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”. dikarenakan pada saat ini masih belum meratanya bantuan tersebut didapat oleh kelompok KUB masyarakat nelayan masih ada yang belum mendapat bantuan dikarenakan ketidahuan tataca mendapatkan bantuan tersebut.

Dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Karakteristik Agen Pelakasana berada pada Kategori “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai partisipasi, transparasi informasi dan pelayanan dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana tapi belum maksimal.

## 5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi adalah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam rana implemntasi dapat mempengaruhi kesuksesan program dalam implementasi, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu Sosial, Politik dan Ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V. 15 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Sosial	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5
2.	Politik	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5
3.	Ekonomi	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5
	Jumlah	8	6	1	15
	Rata-rata	2,7	2	0,3	5
	Persentase	54%	40%	6%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan table V.15 dapat dilihat bahwa rata-rata tanggapan responden aparatur dinas berda pada kategori “Terimplementasi”.

Sosial. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai dengan adanya masyarakat menilai

berpartisipasi dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat merubah keadaan sosial menjadi lebih baik dan lebih terarah.

Politik. Dilihat dari jawaban aparatur dinas Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas sudah memiliki struktur organisasi didinas tersebut dan setiap seksi memiliki kewenangan masing-masing.

Ekonomi. Dilihat dari jawaban aparatur dinas Cukup Terimplementasi, dikarenakan dilihat dari kondisi sebenarnya, program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam membantu keadaan ekonmi masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ibnu rusydiselaku Seksi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dengan pertanyaan Bagaimana menurut bapak kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dalam implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Kepada masyarakat? Apakah dapat membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi? Beliau menjawab :

*“Jelas, secara umum kalau dari segi ekonomi ya jelas memang dengan aduan adanya program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Ini, otomatis keinginan masyarakat nelayan, aspirasi masyarakat dapat ditampung yang artinya misalnya contoh, pembangunan jembatan untuk nelayan Kemudian pihak terkait langsung merespon dan langsung ditindak lanjuti dan jalan itu langsung dianggarkan untuk pembangunannya, otomatis kondisi ekonomi diwilayah itu akan membaik. Secara sosial masyarakat bisa mencari kebenaran apakah misalnya aduannya apakah betul permasalahan ini kondisinya seperti ini, dengan adanya program Pengembangan Perikanan*



*Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Ini otomatis memberikan informasi yang disampaikan langsung dari pihak yang berwenang kepada masyarakat nelayan. Kemudian dari politik yang jelas kita sebagai pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Kalau kita harus bisa memilah-milah mana yang perlu di tindaklanjuti mana yang tidak, mana yang menjadi prioritas dengan pemerintah dan mana yang tidak. Dan itu memang harus kita tentukan, program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dari beberapa efeknya itu yang positifnya” (Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jika program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik dan semestinya dapat membantu dalam perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan jika tidak adanya terkendala COVID-19 maka hasil dari implementasi dari program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sangat jelas dan nyata.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Kondisi Soisal, Politik dan Ekonomi berada pada kategori “ Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan terlihat bahwa program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum maksiamal dalam memberikan pelayanan, karena masih terdapat masyarakat belum dampaknya secara langsung.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”.Hal ini dikarenakan komitmen pemimpin dalam implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas

Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru namun masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota dikarenakan kendala COVID-19.

**Tabel V. 16 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Sosial	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10
2.	Politik	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10
3.	Ekonomi	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10
	Jumlah	9	15	6	30
	Rata-rata	3	5	3	11
	Persentase	27%	45%	27%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Sosial. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat dengan adanya program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru kondisi sosial menjadi lebih baik.

Politik. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Cukup, dikarenakan masyarakat menilai program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru merubah kondisi politik menjadi membaik seperti saat ini setiap kawasan msayrakt nelayan telah memiliki lebih dari satu KUB.

Ekonomi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai setelah ikut program

Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru kondisi ekonomi membaik yang tadinya mereka tidak memiliki kapal saat ini telah memiliki kapal.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi berada pada kategori “Cukup Terimplemntasi”.Hal ini dikarenakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat memberikan hasil kepada masyarakat.

### **C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.**

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui seluruh tanggapan responden terhadap Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Rekapitulasi ini membantu peneliti dalam menilai keseluruhan indikator yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonimi. Apakah Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel rekapitulasi berikut:

**Tabel V.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Skor Penilaian			Kategori
		T	CT	KT	
1.	Standar dan Sasaran Kebijakan	15 (50%)	15 (50%)	0 (0%)	Cukup terimplementasi
2.	Sumber Daya	30 (67%)	15 (33%)	0 (0%)	Terimplementasi
3.	Hubungan Antar Organisasi	24 (80%)	4 (50%)	0 (0%)	Terimplementasi
4.	Karakteristik agen pelaksana	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Terimplementasi
5.	Kondisi Sosial ekonomi dan Politik	8 (54%)	6 (40%)	1 (6%)	Cukup terimplementasi

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari hasil tabel V.17 diatas rekapitulasi yang penulis dapatakan dari hasil penyebaran kuesioner pada aparatur dinas, mereka menjawab rata- rata berada pada kategori “Terimplementasi danCukup terimplementasi”.

Indikator Standar dan Sasaran kebijakan, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksmimal, masih sedikit belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Indikator Sumber Daya, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan mereka menilai sudah menjalankan program Pengembangan



Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP sehingga sudah tepat sasaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat nelayan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur dinas menilai sudah melakukan tanggung jawab dengan kompetensi, transparansi, akuntabilitas, berpartisipasi dan responsivitas. Maka mereka menilai karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi syarat atau sudah terlaksana.

Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur menilai hasil yang maksimal dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas

Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan semestinya.

**Tabel V. 18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Skor Penilaian			Kategori
		T	CT	KT	
1.	Standar dan Sasaran Kebijakan	36 (60%)	16 (40%)	0 (0%)	Cukup Terimplementasi
2.	Sumber Daya	54 (60%)	18 (30%)	3 (10%)	Cukup Terimplementasi
3.	Hubungan Antar Organisasi	54 (90%)	4 (10%)	0 (0%)	Terimplementasi
4.	Karakteristik agen pelaksana	42 (47%)	24 (40%)	4 (13%)	Cukup terimplementasi
5.	Kondisi Sosial dan ekonomi dan Politik	27 (30%)	30 (63,3%)	6 (6,7%)	Cukup terimplementasi

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari hasil tabel V.18 diatas tentang rekapitulasi tanggapan responden masyarakat, yang penulis dapatkan bahwa rata-rata jawaban responden masyarakat berada pada kategori “Terimplementasi”.

Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan dampak yang nyata setelah mengikuti program

## Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Sumber Daya dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab "Cukup Terimplementasi". Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa aparatur dinasprogram Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum memproses aspirasi secara maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya memberikan kemudahan dari segi waktu, efisiensi anggaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat nelayan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab "Cukup Terimplementasi". Hal ini dikarenakan aparatur dinas yang belum maksiamal dalam memberikian pelayanan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab "Cukup Terimplementasi". Hal ini dikarenakan masyarakat melihat kurang maksimalnya perubahan pada kondisi sosial, politik

dan ekonomi dalam implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi masyarakat bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu “ Cukup Terimplementasi”. Karena dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik.

#### **D. Faktor penghambat Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen dari anggota OPD yang mengakibatkan implementasi dari program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik.



2. Tidak terlaksananya beberapa program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru secara berkala adalah dikarenakan dua tahun terakhir terjadi wabah COVID-19 di Indonesia.
3. Masih banyaknya masyarakat nelayan yang belum mengetahui akan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai suatu kebijakan dari pemerintah.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, sesuai dengan tujuan program pengembangan perikanan tangkap yang dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada, dengan melaksanakan berbagai upaya strategis yang ditempuh yaitu mengubah pola pikir para nelayan dari penangkapan di perairan umum daratan (PUD) ke arah budidaya ikan, baik di kolam atau bak terpal maupun di keramba/jaringan apung di perairan umum daratan (PUD), dengan berdasarkan lima indikator yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian yaitu, Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Maka dari itu penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Standar dan Sasaran kebijakan, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, masih sedikit belum sesuai dengan tujuan dari dilaksankan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

2. Indikator Sumber Daya, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan mereka menilai sudah menjalankan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP sehingga sudah tepat sasaran.
3. Indikator Hubungan Antar Organisasi, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat nelayan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.
4. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur dinas menilai sudah melakukan tanggung jawab dengan kompetensi, transparansi, akuntabilitas, berpartisipasi dan responsivitas. Maka mereka menilai karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi syarat atau sudah terlaksana.
5. Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur menilai hasil kegiatan belum maksimal dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas

Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan semestinya dan dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik. Namun kegiatan dan program yang dilaksanakan belum sesuai dengan filosofi program pengembangan perikanan tangkap di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Dinas pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru meskipun kegiatan dalam program perikanan tangkap terimplementasi dengan baik namun masih belum sesuai dengan tujuan awal program tersebut yaitu mengubah pola pikir nelayan kearah budidaya ikan, sebaiknya kegiatan program yang dilaksanakan kedepannya sejalan dengan tujuannya seperti bantuan modal



untuk pengembangan budidaya, atau penyediaan lahan bagi masyarakat untuk melakukan budidaya ikan.

2. Kepada KUB agar kinerja menjadi optimal untuk bersama sama dapat mendirikan koperasi perikanan yang mandiri
3. Sebaiknya dalam melaksanakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru agar ada layanan aspirasi secara online sehingga pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat melaksanakan koordinasi dan sosialisasi secara teratur atau pun terjadwal yang bisa dilakukan setiap bulan tanpa harus bertemu secara langsung, agar masyarakat dapat merasa puas sudah mengikuti program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru seperti pengagasan Onedata KKP sehingga terjadi unifikasi data di dinas.
4. pelaksanaan pendataan rumah tangga perikanan (RTP) kedepannya dapat dibuatkan sebuah aplikasi mobile sehingga para nelayan tidak perlu lagi ke kantor dinas untuk mendaftar hanya tinggal melalui sebuah aplikasi didalam Handpone.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi A. (2010). *Ekonomi Perikanan "Teori Kebijakan dan Pengelolaan*. Jakarta (ID) : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Abidin, Said Zainal. (2011). *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alim, Sumarno. (2012). *Penelitian Kausalitas Kompratif*. Surabaya: Elearningunesa.
- Arifin, Zaibal. (2012). *Penelitian Pendidikan. Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Badrudin. (2013). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W William. (2003). *Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT. Buni Aksara.
- Fathoni, Aburrahmat. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T Hani. (2009). *Manajemen*. Jakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P (2001). *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikana*. Yogyakarta: LKis.
- Nugroho, Riant D. (2012). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Zulkifli, dan Nurmasari. (2015). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Santosa, Pandji. (2009). *Administrasi Publik Teori Aplikasi Good*. Bandung: Refika Aditama.

Siagian, Sondang P. (2003). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Wicaksono, Krintian Widya. (2006). *Administrasi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita .

Zulkifli, Moris Adidi Yogia. (2014). *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Fauzi A & Anna Z. (2002). *Penilaian Despresiasi Sumber daya Perikanan Sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Kebijakan Pembangunan Perikanan*.

Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. pekanbaru: UIR.

#### **DOKUMEN**

*Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pedoman penegelolaan Keuangan Daerah*

*Peraturan Pemerintah No.32 Tahun2019*

*Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/ PERMEN-KEP/ 2014*